



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**AMANAT
MENTERI DALAM NEGERI**

**PADA ACARA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
OTONOMI DAERAH KE XV**

25 April 2011

Yth. Saudara-saudara sebangsa dan se tanah air

Yth. Para peserta upacara

Hadirin dan undangan yang kami hormati,

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia Nya kita dapat melaksanakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XV, pada tanggal 25 April 2011 ini, dengan tema “Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah, dengan Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah”.

Kita juga selalu bersyukur karena kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, sampai sejauh ini telah berjalan dengan baik, dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih dinamis, serta mengembangkan partisipasi rakyat.

Mari kita jadikan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XV ini sebagai momentum untuk mengevaluasi kinerja yang telah kita capai,

sehingga kita terus memperbaiki penyelenggaraan otonomi daerah, yang lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Hadirin yang Yang Berbahagia,

Sejarah perjalanan otonomi daerah di Indonesia sudah sangat panjang, mulai sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi Zaman Kolonial Belanda tahun 1903 hingga hadirnya UU Nomor 32 Tahun 2004. Banyak kemajuan yang telah dicapai, namun harus kita sadari juga bahwa masih banyak pula yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kita telah menjaga amanah para pendiri bangsa agar pelaksanaan pemerintahan daerah tetap bersendi demokrasi, sehingga menjadi komitmen yang kuat hingga sekarang, walaupun silih berganti terjadi pergantian pemerintahan dari demokrasi liberal, terpimpin, demokrasi Pancasila hingga era reformasi dewasa ini.

Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah, di

mana daerah diberikan kesempatan yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya.

Dalam kurun waktu satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah, kita telah melihat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih dinamis, ekonomi daerah yang tumbuh dan berkembang lebih maju, dengan berbasiskan potensi sumberdaya, dan kearifan lokal masing-masing daerah.

Setidaknya terdapat tiga hal prinsip yang berubah secara drastis setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tahun 2000.

Pertama, otonomi daerah secara nyata telah mendorong demokratisasi yang semakin mendalam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari indeks partisipasi politik masyarakat, serta aspek partisipasi pemerintahan daerah yang mengalami peningkatan secara signifikan.

Otonomi daerah juga telah mampu memberikan nuansa baru dalam sistem pemerintahan daerah, dari sentralistik birokratis ke arah desentralistik

partisipatoris, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, otonomi daerah telah menumbuhkan kembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, seluruh masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih luas untuk turut serta membangun daerahnya, sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

Ketiga, dengan desentralisasi yang telah berjalan selama ini, maka berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, tidak lagi harus melalui proses panjang dan berbelit-belit, menjadi sangat efisien dan responsif.

Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintahan daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah. Dengan demikian, maka berbagai aktivitas ekonomi di daerah dapat bertumbuh dengan pesat.

Hadirin yang kami hormati,

Walaupun kita telah melihat perkembangan yang cukup signifikan dalam melaksanakan otonomi daerah, namun kita juga tidak dapat menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih membebani pelaksanaan otonomi daerah, dan menuntut adanya perbaikan dan penyempurnaan.

Untuk itu, upaya penataan penyelenggaraan otonomi daerah secara komprehensif perlu terus kita lakukan.

Perkembangan jumlah daerah otonom dalam sepuluh tahun terakhir ini bertumbuh dengan pesat. Terjadi penambahan sebanyak 205 daerah otonom baru, yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota.

Pada satu sisi, peningkatan jumlah daerah otonom ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan politik desentralisasi di negara kita. Namun pertumbuhan jumlah tersebut, tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing daerah.

Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan agar dapat mempedomani berbagai regulasi yang telah disusun, antara lain PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk meminimalisir tumpang tindih tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah juga sangat perlu untuk memahami dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah daerah diminta untuk menjaga kualitas pelayanan publik, dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal sebagai parameter kinerja pelayanan dasar, sehingga dapat memberikan kepastian kualitas pelayanan bagi masyarakat, serta memberikan ruang bagi mereka untuk ikut berpartisipasi.

Pemerintah daerah juga wajib melakukan evaluasi secara objektif terhadap capaian kinerja pelayanan publik secara lebih komprehensif, melalui

penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tepat waktu, sehingga hasilnya dapat menjadi masukan guna memperbaiki berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada.

Dari aspek dukungan regulasi, juga sangat perlu dilakukan penyesuaian seluruh ketentuan dan peraturan yang telah dikeluarkan sesuai dengan UUD 1945, sehingga terbangun hierarki dan tertib penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dari tingkat pusat hingga ke daerah.

Masih terjadinya tumpang tindih aturan, serta bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu terus dibenahi agar terwujud sinergi dan harmonisasi antara Pusat, daerah hingga seluruh komponen pemerintah di tingkat paling bawah sekalipun.

Semua pihak perlu mengesampingkan egoisme sektoral yang ada, agar proses pendelegasian wewenang yang menjadi tugas pokok otonomi daerah, dapat berjalan sebagaimana mestinya, serta menjadi instrumen untuk mewujudkan esensi

semangat otonomi, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Kita saat ini tengah menyusun disain besar penataan otonomi daerah, yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak dalam melakukan pemekaran daerah ke depan. Dengan demikian, pemekaran daerah akan lebih terencana dengan baik dan berjalan dengan lancar.

Disamping itu, kita juga sedang menyempurnakan sistem pemilihan umum kepala daerah, yang selama ini tidak efisien karena mahalnnya ongkos penyelenggaraan Pemilukada yang membebani APBD, penyalahgunaan wewenang oleh calon *incumbent*; politisasi aparatur birokrasi, serta munculnya kepemimpinan pemerintahan daerah yang kurang efektif, karena harus menanggung beban pembiayaan Pemilukada yang mahal.

Kita ingin menciptakan Pemilukada yang lebih efisien, untuk itu tengah dilakukan finalisasi pembuatan undang-undang Pemilukada.

Mari kita kuatkan komitmen kita bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadi

pilihan kita bersama, sehingga berbagai kekurangan yang masih ada, akan terus kita perbaiki dan sempurnakan di masa depan.

Melalui peringatan Hari Otonomi Daerah ini, kita akan terus bertekad untuk membenahi berbagai hal yang masih belum optimal dilaksanakan selama ini, serta akan selalu bekerja keras untuk melakukan yang terbaik dalam menjalankan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, akan senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita semua, untuk terus mengabdikan bagi kemajuan penyelenggaraan otonomi daerah di masa depan.

Selamat Hari Otonomi Daerah!

Demikian, dan terima kasih

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MENTERI DALAM NEGERI

GAMAWAN FAUZI